

BAB III

ISU *COMFORT WOMEN* DALAM HUBUNGAN JEPANG DENGAN KOREA SELATAN

Pada bab ini akan disajikan sejarah awal kemunculan isu *comfort women* sebagai pengantar dan penjelasan mengenai pengertian *comfort women*, kapan dibentuk dan apa saja yang terjadi pada masa Perang Dunia II terkait dengan isu tersebut. Selanjutnya akan diberikan penjelasan adanya permasalahan di antara Jepang dan Korea Selatan terkait dengan isu ini dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. *Comfort women* sudah menjadi isu yang dipermasalahkan sejak lama, namun belum dapat diselesaikan. Meskipun Jepang dan Korea Selatan telah lama berdamai dan memiliki hubungan diplomatik, hubungan kedua negara masih sering mengalami pasang surut. Pada peringatan ke-50 tahun hubungan bilateral kedua negara, isu ini akhirnya dapat diselesaikan. Selama 50 tahun tersebut, isu *comfort women* menjadi penghalang hubungan bilateral yang cukup besar.

A. *Comfort Women* pada Masa Imperialisme Jepang di Semenanjung Korea

Comfort women merupakan istilah halus dari kata *sex slavery* dalam bahasa Inggris. Istilah tersebut ditujukan kepada perempuan-perempuan yang dijadikan budak seks oleh pemerintah Jepang untuk melayani militer Jepang pada masa penjajahan Jepang hingga Perang Dunia II. Di Indonesia, istilah *comfort women* lebih dikenal dengan sebutan *jugun ianfu* yang

berasal dari bahasa Jepang. Di Korea Selatan sendiri, *comfort women* dikenal dengan sebutan *wianbu*, yang kata tersebut merupakan kata serapan dari *ianfu* dalam bahasa korea.

Comfort women yang baru saja mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahannya ini, sebenarnya telah menyebar di media massa dan Jepang sudah mendapat tuntutan dari negara-negara korban sejak tahun 1991. Awal mula kemunculan ini berasal dari seorang warga negara Jepang yang bernama Kakou Senda. Ia merupakan seorang penulis yang menulis buku pertama mengenai isu *comfort women* di Jepang. Ia menulis buku tersebut pada tahun 1973 dan mendapat berbagai kritikan dari sejarawan Korea Selatan dan Jepang (Tanaka T. , 2002).

Dalam bukunya ia menyebutkan bahwa pada masa Perang Dunia II, Jepang yang kala itu terlibat dalam perang, membentuk sebuah kebijakan untuk mendirikan rumah-rumah bordil. Rumah bordil tersebut berisikan perempuan-perempuan yang sebagian besar berasal dari negara-negara jajahan Jepang. Perempuan-perempuan tersebut dijadikan wanita pemuas kebutuhan biologis para tentara. Pembuat kebijakan tersebut mengklaim bahwa tentara-tentaranya membutuhkan kepuasan seksual di medan perang. Meskipun telah diungkapkan pada tahun 1973, isu ini baru terbukti dan mendapat respons dari negara-negara korban dan para aktivis pada tahun 1990-an (Tanaka T. , 2002).

Dari sudut pandang Jepang, *comfort women* bukanlah perbudakaan seks. Mereka mengklaim bahwa yang terjadi adalah prostitusi. Perempuan-perempuan pemuas kebutuhan seksual tentara tersebut bersifat sukarela, dan mendapat bayaran. Perempuan-perempuan tersebut dibayar oleh para tentara setelah melayani mereka.

Rumah bordil yang digunakan disebut dengan *ianjo*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *comfort station*. Keberadaan *ianjo* sebenarnya tidak diketahui secara pasti kapan dibentuk pertamakalinya karena tidak adanya bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut. Selain itu, sistem perekrutan *comfort women* terjadi secara tertutup sehingga tidak ada dokumen resmi yang berisi data rekrutmen *comfort women*. Yuki Tanaka, seorang profesor di Hiroshima Peace Institute, Hiroshima City University, merupakan seorang anak dari anggota militer Jepang dan seorang sejarawan terakhir yang masih meneliti dimensi sejarah *comfort women*. Dalam buku yang ditulisnya disebutkan bahwa, awal mula terjadinya kebijakan tersebut ialah ketika insiden Shanghai berlangsung, yaitu pada tahun 1932. Ketika Jepang menjajah Shanghai, *comfort Station* pertama ditujukan untuk para pasukan militer angkatan laut. *comfort Station* tersebut didirikan sekitar tahun 1938 dan disebut dengan *navy ianjo* (Tanaka T. , 2002).

Sebelum terjadi insiden Shanghai, pemerintah China telah melarang rumah-rumah bordil Jepang didirikan. Karena aturan tersebut, Jepang menjalankan bisnis restoran yang memperkerjakan geisha-geisha dan pelayan restoran yang dijadikan sebagai wanita penghibur. Namun, saat itu

wanita penghibur tersebut masih tergolong pelaku prostitusi karena wanita-wanita itu tetap dibayar. Geisha pada dasarnya merupakan perempuan dengan kemampuan seni yang luar biasa yang telah dilatih sejak kecil. Menjadi geisha merupakan kehormatan tersendiri. Namun demikian, sejak perang-perang terjadi geisha mulai berubah fungsi. Meskipun telah dilatih menari, bermain musik dan bernyanyi, pada akhirnya mereka harus melayani kebutuhan seks setiap laki-laki yang menginginkannya.

Peralihan fungsi geisha tersebut menjadikan bisnis prostitusi di China dan Jepang semakin meluas. Namun demikian, bisnis prostitusi berkedok restoran ini tidak ditujukan untuk anggota militer sehingga ketika terjadi insiden Shanghai, militer Jepang mendirikan rumah bordil khusus untuk angkatan laut Jepang. Sekitar tahun 1936 tercatat adanya 10 rumah bordil di Shanghai yang terdiri dari 102 wanita Jepang dan 29 wanita Korea yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Tujuh rumah merupakan rumah bordil untuk militer Jepang dan tiga lainnya merupakan “restoran jepang”. Tujuh rumah tersebut diperuntukkan khusus untuk anggota-anggota eksekutif angkatan laut Jepang. Masyarakat umum tidak diijinkan memasuki rumah-rumah tersebut (Tanaka T. , 2002).

Tabel 3.1
Jumlah Comfort Station dan *Comfort Women* di China bagian timur
tengah tahun 1938-1939.

Tempat	<i>Comfort Station</i> Angkatan Darat	<i>Comfort women</i>
Shanghai	Tidak diketahui(7 rumah bordil angkatan laut)	300
Hangzhou	4	36
Jiujiang	24	250 (143 Korea & 107 Jepang)
Wuhu	6	70 (22 Korea & 48 Jepang)
Wuhan	20	492 (beberapa merupakan pelayan restoran)
Nanchang	11	111 (100 Korea & 11 Jepang)
Zhenjiang	8	Tidak diketahui
Yangzhou dan Danyang	1	Tidak diketahui

Sumber : Japan's *Comfort women* karya Toshiyuki Tanaka, 2002

Jepang mengirim *comfort women* pertama kali saat perang Sino-Jepang pada tahun 1937. *Comfort women* mulai sering dikirimkan ke China sejak perang Asia-Pasifik terjadi. Pasukan angkatan darat Jepang mulai mendirikan rumah-rumah bordil seperti yang telah dilakukan oleh para pasukan angkatan laut di Shanghai. Keputusan tersebut dibuat oleh Jenderal Okamura Yasuji, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Tentara Ekspedisi Shanghai. Yasuji membuat keputusan tersebut bertujuan untuk menghindari

pemeriksaan para tentara terhadap masyarakat China atau di tanah perang lainnya. Ia juga meminta Gubernur Nagasaki untuk mengirimkan beberapa wanita untuk dijadikan *comfort women* di Shanghai. Jenderal Okamura menyatakan bahwa *comfort women* yang dikirim ke Shanghai merupakan *karayuki-san*, wanita penghibur Jepang yang berasal dari keluarga miskin dan telah dijual oleh orang tuanya untuk dikirim ke rumah bordil di luar negeri. Ia menyangkal jika *comfort women* tersebut berasal dari Korea. Dari pengakuannya, perempuan-perempuan tersebut merupakan perempuan profesional Jepang (Tanaka T. , 2002).

Namun kenyataannya, saat itu Jepang memang sedang menganeksasi Semenanjung Korea. Mereka dapat mengambil perempuan-perempuan Korea dengan paksa. Kebanyakan dari pengakuan korban, beberapa di antara mereka ditawarkan pekerjaan atau pendidikan di Jepang dan mereka diangkut dengan mobil tentara. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam gerbong-gerbong kereta dengan berbagai tujuan tempat. Kebanyakan dari mereka dikirim ke China. Sesampainya di China mereka akan dibariskan dan dipilih untuk penempatan di rumah bordil. Sesampainya di rumah bordil, mereka akan diperiksa kesehatannya yang meliputi kesehatan organ intim. Kesehatan organ intim tersebut penting karena dokumen dari markas brigade yang mengurus kesehatan dan sanitasi mencatat banyaknya jumlah wanita yang memiliki VD (Venereal Disease) yaitu penyakit menular seksual (Tanaka T. , 2002).

Pembentukan *comfort station* kemudian menyebar ke beberapa daerah di wilayah China bagian timur tengah dan dibuka untuk umum. Terdapat ratusan perempuan yang dipekerjakan di *comfort station*, sebagian mereka bekerja sebagai pelayan dan sebagian lainnya bekerja sebagai *comfort women*. Kebanyakan perempuan-perempuan yang berada di *comfort station* berkewarga negaraan Korea. Selain di wilayah China, *comfort women* juga mulai menyebar di negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Myanmar, dan Filipina (Tanaka T. , 2002).

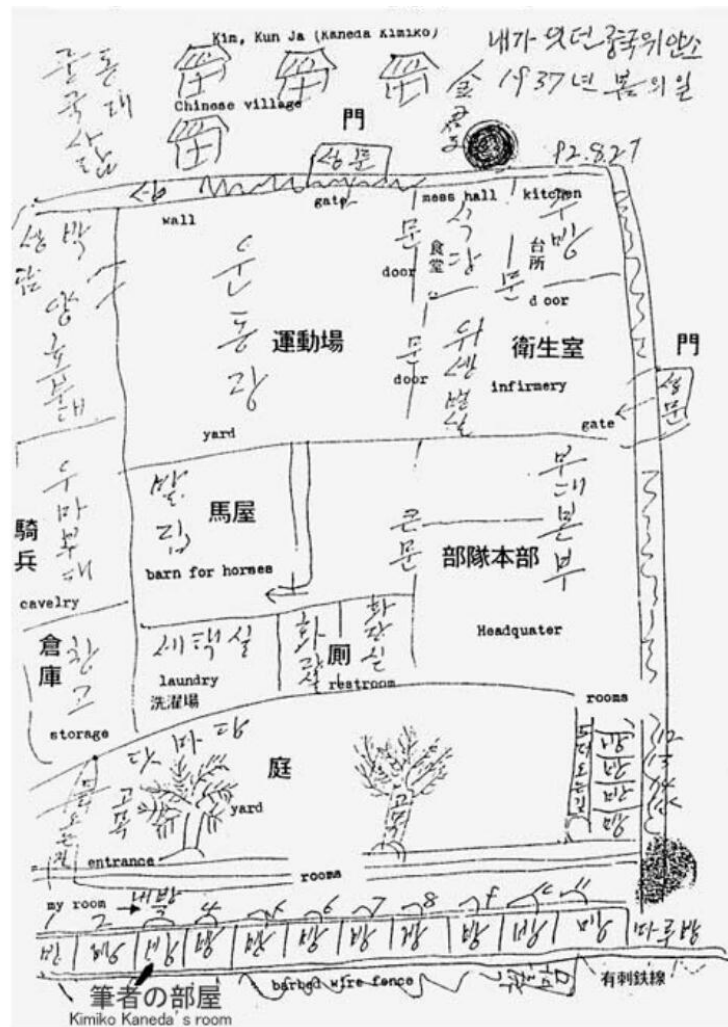
Dari beberapa pengakuan mantan *comfort women*, kebanyakan dari mereka dijemput dengan iming-iming pekerjaan, dari buruh pabrik hingga pembantu rumah tangga Jepang. Mereka kemudian di kirim ke China dan negara asia tenggara lainnya untuk dipekerjakan sebagai budak seks. Sesampainya di *comfort station* mereka akan dibagi dalam kelompok berdasarkan umur masing-masing dan diberi nama Jepang. Mereka juga menyebutkan bahwa perempuan-perempuan budak seks harus melakukan hysterectomy (pengangkatan rahim). Sedangkan mereka yang tidak menjalani pengangkatan rahim harus menanggung kehamilan dan proses kelahiran di dalam *comfort station*.

Kimiko Kaneda, mantan *comfort women* yang ikut aktif menuntut Jepang bersama dengan aktifis-aktifis perempuan di Korea Selatan, menceritakan pengalamannya sebagai *comfort women*. Saat itu ia berumur 16 tahun dan berniat mencari pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga orang Jepang. Ia mengakui bahwa dirinya dibawa paksa oleh tentara Jepang dan

dikirim ke China, tepatnya di daerah Zaoqiang. Tempat tersebut merupakan unit pangkalan angkatan darat Jepang. Ia menggambarkan lokasi *comfort station* yang ia tempati.

Gambar 3.1

Peta *Comfort Station* Kimiko Kaneda di Zhaoqiang Tahun 1937



Sumber : Asian Women Fund

Setiap *comfort station* memiliki nama, seperti *comfort station* yang ada di Wuchang memiliki nama World View, di luar daerah Wuchang

terdapat *comfort station* bernama Yamato dan Katobuki. Salah satu *comfort women* di Wuhan bernama sanserio. Jika ada perempuan yang terserang penyakit dengan tingkat keparahan yang cukup tinggi di rumah bordil, mereka dibuang di parit dan dibiarkan hingga mati. Setelah terkumpul cukup banyak, mayat-mayat tersebut dibakar oleh prajurit Jepang atau petugas *comfort station* (Verband, 2013).

Keberadaan *Comfort women* ini berakhir pada tahun 1945 ketika Jepang menyerah terhadap Sekutu. Segala catatan dan dokumen terkait *comfort women* dimusnahkan, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan masalah dimasa depan. Namun sisi gelap Jepang tersebut akhirnya terungkap pada tahun 1973. Isu ini kemudian mendapat perhatian dunia pada tahun 1990-an saat korban-korban *comfort women* mulai membuka suara mereka (AWF, 1998).

Pada tahun 2015 tercatat ada 46 perempuan yang masih hidup di Korea Selatan (BBC, Japan and South Korea Agree WW2 'Comfort Women' Deal, 2015). Sebagian dari mereka tinggal di panti khusus untuk para mantan *comfort women* yang berlokasi di Provinsi Gwangju, Korea Selatan, sebagian lainnya tinggal dengan keluarganya. Usia termuda *halmoni* (sebutan para perempuan lanjut usia ditujukan pada mantan *comfort women*) saat ini (pertahun 2015) adalah 83 tahun. Panti tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah Korea Selatan, juga LSM *comfort women*. Di tempat tersebut semua perempuan lanjut usia mendapat fasilitas penuh seperti kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Panti tersebut difungsikan sebagai museum *comfort*

women. Terdapat beberapa dokumen, foto, dan patung-patung perempuan *comfort women* yang telah meninggal. Di panti itu masyarakat juga dapat bertemu langsung dengan perempuan-perempuan mantan *comfort women*.

B. *Comfort Women* Menjadi Isu Politik di Jepang

Untuk menutupi kebijakan *comfort women*, segala dokumen terkait isu tersebut dimusnahkan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu. Para *Comfort women* banyak yang dibunuh untuk menutupi jejak keberadaan mereka. Hal tersebut dilakukan agar korban tidak mudah untuk menuntut pertanggungjawaban Jepang. Namun demikian, beberapa korban *comfort women* masih hidup menjadi catatan sejarah kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang. Beberapa korban bahkan tidak dapat kembali ke negaranya. Sebagian dari mereka telah lupa mengenai masa lalunya karena trauma fisik dan mental yang timbul akibat perbudakan seks selama menjadi *Comfort women* (Tanaka Y. , 2002).

Tercatat ada sekitar 200.000 perempuan yang dijadikan *Comfort women* oleh Jepang yang sebagian besar dari mereka merupakan warga negara Korea (Han & Sun, 2015). Ketika perang telah usai, beberapa dari mereka berhasil kembali ke negaranya dan sebagian lainnya masih menetap di China. Tidak banyak perempuan-perempuan tersebut dibiarkan hidup oleh Jepang. Beberapa mantan *Comfort women* yang masih hidup berusaha untuk tetap bertahan dan berharap bahwa keadilan atas mereka akan datang.

Setelah keberadaan mantan *Comfort women* tersebar di media massa, *comfort women* menjadi masalah baru bagi Jepang dan Korea Selatan. Disatu

sisi Jepang menolak adanya praktek ilegal perbudakan seks pada masa Perang Dunia Dua dan juga Jepang menganggap masalah kolonialisme Jepang di Korea telah diselesaikan dalam perjanjian damai tahun 1965. Pada saat membentuk perjanjian damai tersebut, Korea Selatan dan Jepang sepakat menyertakan bantuan finansial terkait kerugian masa kolonialisasi Jepang. Saat itu Jepang setuju memberikan bantuan untuk digunakan dalam mengembangkan perekonomian Korea Selatan sebesar 300 juta dolar dan memberikan pinjaman sebesar 200 juta dolar. Bantuan serta penandatanganan perjanjian yang disebut dengan 'Korea-Japan Treaty' tersebut ditujukan untuk menyelesaikan semua masalah terkait kolonialisasi Jepang (AWF, 1998).

Korea Selatan membawa kasus tersebut ke ranah internasional setelah Jepang menolak pengajuan hukum atas pertanggungjawaban isu *Comfort women* dari Korea Selatan. Sejak itu pula hubungan Korea Selatan kembali memanas, isu lainnya seperti perebutan pulau Dokdo/Takeshima, masa penjajahan, dan kuil Yasukuni, juga menjadi hal yang selalu dipertimbangkan dalam membahas hubungan bilateral kedua negara.

Setelah isu mengenai adanya keterlibatan Jepang dalam *Comfort women* tersebar, Korea Selatan yang menjadi salah satu negara yang memiliki banyak korban mulai mendata korban-korban yang ada. Tahun 1991 merupakan awal pemerintah Korea Selatan mengumumkan melewati media massa bahwa setiap korban *Comfort women* dianjurkan untuk melapor di kantor wilayah setiap daerah. Laporan tersebut nantinya akan dijadikan bukti

dalam bentuk dokumen untuk diajukan ke Jepang dan internasional agar kejahatan kemanusiaan ini dapat dipertanggungjawabkan.

Isu ini sempat dibawa ke beberapa organisasi dari PBB sejak 1990-an. Dokumen penting terkait isu ini pertama kali dilayangkan ke United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) pada 4 Januari 1996. Dokumen ini berisi laporan terkait isu *Comfort women* sebagai perbudakan seks militer dan menuntut Jepang untuk menerima hukuman akibat pelanggaran hukum internasional. Sejak isu tersebut ramai, Jepang mendirikan Asian Women's Fund untuk menanggung mantan *Comfort women* yang masih hidup. Namun demikian, banyak aktivis beranggapan bahwa pembentukan LSM tersebut tidak menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah Jepang secara legal. Kenyataannya, Jepang masih tidak mengakui bahwa pembentukan *Comfort Station* dan *Comfort women* merupakan kebijakan militer Jepang serta tidak adanya permintaan maaf atas *Comfort women*.

Tanggal 22 Juni 1998, isu *Comfort women* kembali dibawa ke UNCHR Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Pengajuan tersebut merupakan 'feedback' dari dokumen yang dikeluarkan oleh Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Right, dokumen tersebut menunjukkan bahwa Jepang telah berupaya menyelesaikan isu tersebut menggunakan AWF. Meskipun pihak korban merasa tidak puas dengan hasil keputusan yang dikeluarkan, upaya Jepang dalam menyelesaikan isu tersebut dirasa cukup oleh UNCHR (AWF, 1998).

Untuk menanggapi sikap Jepang terkait isu *Comfort women* yang dirasa pasif, aktifis Korea Selatan bersama dengan masyarakat dan mantan *Comfort women* melakukan aksi demo. Demonstrasi ini sebenarnya dilakukan pertama kali pada 8 Januari 1992 saat Perdana Menteri Jepang, Miyazawa, berkunjung ke Korea Selatan. Selanjutnya demo ini dilakukan setiap Rabu di depan kantor Kedutaan Jepang di Seoul hingga saat ini. Para demonstran juga mendirikan patung sebagai lambang *Comfort women* di depan Kantor Kedutaan Jepang pada tahun 2011. Patung itu disebut juga dengan ‘Statue of Peace’ atau dalam bahasa korea disebut dengan Pyeonghwabi.

Aksi demonstrasi ini sejak awal menuntut pengakuan Jepang atas kebijakannya dalam membentuk *Comfort women*, mempublikasikan kebenaran atas kriminal perbudakan seks yang terjadi saat perang, meminta maaf pada korban dan keluarga, membentuk penyelesaian isu yang legal, menghukum pihak yang bersalah, mencatat isu tersebut dalam sejarah (textbooks) dan mendirikan museum sejarah berkaitan dengan isu tersebut (Wednesday Demonstration of Comfort Women).

Setelah mengalami perjalanan panjang dari upaya penyelesaian isu *Comfort women*, 28 Desember 2015 merupakan ukiran sejarah baru bagi hubungan Jepang dengan Korea Selatan. Pada peringatan 50 tahun hubungan bilateral kedua negara ini disampaikan bahwa isu *Comfort women* telah diselesaikan dalam sebuah kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua negara yang diwakili oleh Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye, dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yun Byung Se, di Seoul. Dalam pidatonya Fumio Kishida mewakili Perdana Menteri Jepang mengatakan sebagai berikut.

“As prime minister of Japan, Prime Minister Abe expresses anew sincere apologies and remorse from the bottom of this heart to all those who suffered immeasurable pain and incurable physical and psychological wounds as ‘Comfort women’.”

Kesepakatan tersebut berisi permintaan maaf Jepang atas kejahatan perbudakan seks yang dilakukan militer Jepang saat perang, pemberian uang sebagai kompensasi sebesar 8.3 juta dolar, dan Jepang meminta agar kelompok masyarakat dapat menyingkirkan patung lambang *Comfort women* yang ada di depan kantor Kedutaan Jepang di Seoul. Kesepakatan ini bersifat *‘finally and irreversible’* yang artinya kesepakatan ini tidak dapat diperbaharui (BBC, Japan and South Korea Agree WW2 'Comfort Women' Deal, 2015). Yang membedakan kesepakatan ini dengan pendahulunya ialah status uang yang diberikan pemerintah Jepang. Uang tersebut dialokasikan langsung dari dana pemerintah. Bantuan yang diberikan pihak Jepang sebelum-sebelumnya berasal dari uang santunan atau bantuan dari LSM atau organisasi non pemerintah lainnya. Status uang ini menandakan bahwa Jepang telah mengakui adanya keterlibatan pemerintah Jepang dalam membentuk kebijakan keberadaan *Comfort women*.